



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;

- b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 374);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 631 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024

**NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2024**

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)**

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
1	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Deputi Bidang Intelijen Ekonomi	Badan Intelijen Negara
3	Kantor Regional V BKN	Badan Kepegawaian Negara
4	Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
5	Perwakilan BKKBN Provinsi Bali	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
6	Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
7	Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
8	Stasiun Geofisika Mataram	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
9	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Badan Narkotika Nasional
10	BNN Kota Denpasar	Badan Narkotika Nasional
11	BNN Kabupaten Purbalingga	Badan Narkotika Nasional
12	Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
13	Deputi Bidang Investigasi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14	Pusat Informasi Pengawasan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
15	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
16	Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17	Biro Organisasi Sumber Daya Manusia	Badan Siber dan Sandi Negara
18	Deputi Bidang Akreditasi	Badan Standardisasi Nasional
19	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Badan Standardisasi Nasional
20	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo	Kementerian Agama
21	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang	Kementerian Agama
22	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur	Kementerian Agama
23	Kantor Kementerian Agama Kota Batam	Kementerian Agama
24	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	Kementerian Agama
25	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara	Kementerian Agama
26	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli	Kementerian Agama
27	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	Kementerian Agama
28	Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
29	Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
30	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
31	Kantor Pertanahan Kota Palopo	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
32	Kantor Pertanahan Kota Probolinggo	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
33	Kantor Pertanahan Kota Mojokerto	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
34	Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
35	Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
36	Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
37	Kantor Pertanahan Kota Cilegon	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
38	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
39	Kantor Pertanahan Kota Kediri	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
40	Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
41	Inspektorat II	Kementerian Dalam Negeri
42	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
43	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
44	Balai Besar Kekearantinaan Kesehatan Denpasar	Kementerian Kesehatan
45	Balai Besar Kekearantinaan Kesehatan Makassar	Kementerian Kesehatan
46	Balai Besar Kekearantinaan Kesehatan Surabaya	Kementerian Kesehatan
47	Balai Kekearantinaan Kesehatan Kelas I Banten	Kementerian Kesehatan
48	Balai Kekearantinaan Kesehatan Kelas I Semarang	Kementerian Kesehatan
49	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar Es Salaam	Kementerian Luar Negeri
51	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina	Kementerian Luar Negeri
52	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru	Kementerian Luar Negeri
53	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco	Kementerian Luar Negeri

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
54	Direktorat Event Daerah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
55	Politeknik Pariwisata Lombok	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
56	Balai Bahan Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
57	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
58	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
59	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
60	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
61	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
62	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
63	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
64	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
65	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
66	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
67	Balai Pengujian Mutu Barang	Kementerian Perdagangan
68	Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal	Kementerian Perdagangan
69	Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei	Kementerian Perdagangan
70	Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico	Kementerian Perdagangan
71	Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
92	UPTD Puskesmas Kaliwungu	Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
93	UPTD Puskesmas Rejosari	Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
94	RSUD Sunan Kalijaga	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
95	RSUD dr. R. Soetrasno	Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun	Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun
98	Puskesmas Sumbersari Kecamatan Saradan	Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun
99	Kecamatan Plaosan	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
100	Puskesmas Manyar	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
101	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
102	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
103	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo	Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
104	Puskesmas Leces	Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
105	Puskesmas Omben	Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang
106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
107	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
72	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Makassar	Kementerian Perhubungan
73	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong	Kementerian Perhubungan
74	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	Kementerian Perindustrian
75	Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan	Kementerian Pertahanan
76	Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden	Kementerian Sekretariat Negara
77	Sentra Phalamartha di Sukabumi	Kementerian Sosial
78	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU	Komisi Pemilihan Umum
79	KPU DIY	Komisi Pemilihan Umum
80	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara
81	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
82	LPP RRI Kendari	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia
83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
85	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
86	RSUD Cilacap	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
87	Puskesmas Kedungreja	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali	Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali
89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen	Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
108	Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
110	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
111	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
112	RSUD Panglima Sebaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
113	UPT Puskesmas Meral	Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
114	RSUD Natuna	Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
115	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
117	UPTD Puskesmas Dawan I	Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
118	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
119	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara
120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung	Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
121	RSUD Balaraja	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
122	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
123	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
124	Puskesmas Banguntapan III	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
125	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
126	UPTD Puskesmas Bogor Selatan	Pemerintah Daerah Kota Bogor
127	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	Pemerintah Daerah Kota Cirebon
128	UPTD Puskesmas Urug	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
129	Kecamatan Purwaharja	Pemerintah Daerah Kota Banjar
130	Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Pemerintah Daerah Kota Surakarta
131	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	Pemerintah Daerah Kota Magelang
132	RSUD Tidar	Pemerintah Daerah Kota Magelang
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	Pemerintah Daerah Kota Blitar
134	Puskesmas Tenggilis	Pemerintah Daerah Kota Surabaya
135	Puskesmas Jagir	Pemerintah Daerah Kota Surabaya
136	UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan	Pemerintah Daerah Kota Denpasar
137	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	Pemerintah Daerah Kota Denpasar
138	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Pemerintah Daerah Kota Denpasar
139	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram	Pemerintah Daerah Kota Mataram
140	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto	Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
141	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan
142	UPTD Puskesmas Pondok Pucung	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan
143	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	Pemerintah Daerah Kota Padang
144	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Pemerintah Daerah Kota Padang
145	RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Pemerintah Daerah Kota Padang

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
146	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok	Pemerintah Daerah Kota Solok
147	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukit Tinggi	Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi
148	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	Pemerintah Daerah Kota Depok
149	UPPD Kabupaten Semarang	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
150	RSJD Dr. Samsi Jacobalis	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
151	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Pemerintah Daerah Provinsi Riau
152	SMAN 1 Kabupaten Tangerang	Pemerintah Daerah Provinsi Banten
153	RSJ Prof. HB. Saanin Padang	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
154	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi D. I. Yogyakarta	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta
155	Puskesmas Kecamatan Kembangan	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
156	RSUD Tanah Abang	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
157	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
158	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
159	UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
160	UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
161	UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
1	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
2	Stasiun Meteorologi Hasanudin	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	Badan Pemeriksa Keuangan
4	Balai Besar POM di Denpasar	Badan Pengawas Obat Dan Makanan
5	Balai POM di Gorontalo	Badan Pengawas Obat Dan Makanan
6	Balai Besar POM di Makassar	Badan Pengawas Obat Dan Makanan
7	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	BPS Provinsi Jawa Tengah	Badan Pusat Statistik
9	BPS Provinsi Bali	Badan Pusat Statistik
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
11	Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
12	Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
13	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
14	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
15	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
16	Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya	Kementerian Keuangan
17	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima	Kementerian Keuangan
18	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	Kementerian Keuangan
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa	Kementerian Keuangan
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	Kementerian Keuangan
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	Kementerian Keuangan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	Kementerian Keuangan
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang	Kementerian Keuangan
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon	Kementerian Keuangan
25	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan	Kementerian Keuangan
26	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	Kementerian Keuangan
27	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	Kementerian Keuangan
28	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Kementerian Keuangan
29	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Keuangan
30	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kementerian Keuangan
31	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pematang Siantar	Kementerian Keuangan
32	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Baturaja	Kementerian Keuangan
33	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Gunung Sitoli	Kementerian Keuangan
34	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok	Kementerian Keuangan
35	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII	Kementerian Keuangan
36	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wates	Kementerian Keuangan
37	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pati	Kementerian Keuangan
38	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purworejo	Kementerian Keuangan
39	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sidoarjo	Kementerian Keuangan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
40	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pangkalan Bun	Kementerian Keuangan
41	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau	Kementerian Keuangan
42	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Singkawang	Kementerian Keuangan
43	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong	Kementerian Keuangan
44	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung	Kementerian Keuangan
45	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan	Kementerian Keuangan
46	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau	Kementerian Keuangan
47	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai	Kementerian Keuangan
48	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju	Kementerian Keuangan
49	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sinjai	Kementerian Keuangan
50	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	Kementerian Keuangan
51	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Kementerian Keuangan
52	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II	Kementerian Keuangan
53	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo	Kementerian Keuangan
54	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai	Kementerian Keuangan
55	Biro Komunikasi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
56	Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
57	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
58	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan – Berau	Kementerian Perhubungan
59	Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya	Kepolisian Negara Republik Indonesia
60	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi RI
61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
62	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
64	UOBF Puskesmas Jenu	Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	Pemerintah Daerah Kota Madiun
66	Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	Pemerintah Daerah Kota Malang
67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta	Pemerintah Daerah Kota Surakarta
68	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta
69	UPTD RSUD Al Ihsan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
70	RSJ Mutiara Sukma	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI